

## POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA DI INDONESIA

**Rohinur Annasari Harahap<sup>1</sup>, Tito Handoko<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Riau

Email Korespodensi: rohinurannasari@gmail.com

Email: tito.handoko@lecturer.unri.ac.id

### ABSTRACT

Dynastic politics in Indonesia emerges not only at the national and regional levels but also at the village level as part of the complex dynamics of local governance. This study conducted a scientific literature review of several case studies and journal articles examining the phenomenon of political dynasties in village head leadership, including research in Mekar Jaya Village, Cileunyi Wetan Village, Sukowati Village, and Nyogan Village, as well as the conceptual development of dynastic politics in village head elections and village social structures. The study's results indicate that the formation of dynastic politics in village leadership is influenced by several key factors, namely family social capital, economic resources, and support from local elites. Social capital plays a role in building community trust, while economic resources and local elite networks provide advantages in political contestation. Furthermore, political dynasty patterns are also formed through the reproduction of family power, social networks, and the legitimacy of the performance of previous village heads. In terms of impact, dynastic politics has ambivalent implications for village democracy. Positively, this practice can create leadership stability, policy continuity, and effective village development. However, dynastic politics also has the potential to hinder elite circulation and create unequal political access within society. Thus, dynastic politics in village leadership is a complex phenomenon that requires a comprehensive understanding within the framework of local democracy in Indonesia.

**Keywords:** Dynastic politics, Leadership.

### ABSTRAK

Politik dinasti di Indonesia tidak hanya muncul di arena nasional maupun regional, tetapi juga berkembang di tingkat desa sebagai bagian dari dinamika pemerintahan lokal yang kompleks. Penelitian ini melakukan tinjauan literatur ilmiah terhadap sejumlah studi kasus dan artikel jurnal yang mengkaji fenomena dinasti politik dalam kepemimpinan kepala desa, termasuk penelitian di Desa Mekar Jaya, Cileunyi Wetan, Desa Sukowati, Desa Nyogan, serta perkembangan konseptual politik dinastik dalam pilkades dan struktur sosial desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa terbentuknya politik dinasti dalam kepemimpinan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu modal sosial keluarga, sumber daya ekonomi, dan dukungan elit lokal. Modal sosial berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat, sementara sumber daya ekonomi dan jaringan elit lokal memberikan keunggulan dalam proses kontestasi politik. Selain itu, pola dinasti politik juga terbentuk melalui mekanisme reproduksi kekuasaan keluarga, jaringan sosial, serta legitimasi kinerja kepala desa sebelumnya. Dari sisi dampak, politik dinasti memiliki implikasi ambivalen terhadap demokrasi desa. Secara positif, praktik ini mampu menciptakan stabilitas kepemimpinan, kesinambungan kebijakan, dan efektivitas pembangunan desa. Namun demikian, politik dinasti juga berpotensi menghambat sirkulasi elit serta menciptakan ketimpangan akses politik dalam masyarakat. Dengan demikian, politik dinasti dalam kepemimpinan desa merupakan fenomena kompleks yang perlu dipahami secara komprehensif dalam kerangka demokrasi lokal di Indonesia.

**Kata kunci:** Politik dinasti, Kepemimpinan.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

435

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



## PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam implementasi desentralisasi dan demokrasi lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadikan kepala desa sebagai aktor kunci dalam menentukan arah kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal (Dwinugraha, 2020). Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala desa secara langsung merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat yang diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, demokrasi desa tidak selalu berjalan secara ideal. Salah satu fenomena yang berkembang adalah munculnya praktik politik dinasti dalam kepemimpinan desa, di mana kekuasaan diwariskan dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat (Lestario, 2022).

Politik dinasti dalam kepemimpinan desa menunjukkan adanya pergeseran dari demokrasi substantif menuju demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural hanya menekankan pada pelaksanaan mekanisme formal seperti pemilihan umum, tanpa menjamin adanya kompetisi yang adil dan setara. Dalam banyak kasus, kepala desa yang terpilih berasal dari keluarga yang sama dengan kepala desa sebelumnya, sehingga menciptakan dominasi kekuasaan dalam satu kelompok tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepemimpinan desa tidak sepenuhnya didasarkan pada meritokrasi atau kapasitas individu, melainkan dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan jaringan sosial. Hal ini berdampak pada perubahan karakter kepemimpinan kepala desa dari yang seharusnya partisipatif menjadi lebih bersifat personalistik dan oligarkis (Sartinayanti et al., 2024).

Penelitian Susanti (2023) menunjukkan bahwa dinasti politik di Desa Nyogan terbentuk melalui hubungan klientelisme antara kepala desa dan masyarakat. Dalam hubungan ini, kepala desa sebagai patron memberikan bantuan atau akses terhadap sumber daya kepada masyarakat sebagai imbalan atas dukungan politik. Pola ini memperkuat kekuasaan kepala desa sekaligus menciptakan ketergantungan masyarakat. Selain itu, penelitian Siregar et al. (2021) menemukan bahwa politik dinasti di Desa Mangaledang Lama terbentuk melalui kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Keluarga yang memiliki sumber daya ekonomi dan pengaruh sosial cenderung lebih mudah mempertahankan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan desa dalam sistem dinasti tidak hanya ditentukan oleh proses politik formal, tetapi juga oleh struktur sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif teori kekuasaan, kekuasaan kepala desa dalam sistem dinasti tidak hanya bersumber dari legitimasi formal, tetapi juga dari relasi sosial dan budaya yang mengakar dalam masyarakat. Kepala desa yang berasal dari keluarga tertentu seringkali memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan calon lain, sehingga memperbesar peluang kemenangan dalam pemilihan (Arifin, 2025). Lebih lanjut, praktik politik dinasti juga dipengaruhi oleh budaya paternalistik yang masih kuat dalam masyarakat desa. Dalam budaya ini, masyarakat cenderung menghormati dan mempercayai keluarga yang telah lama memegang kekuasaan. Kepercayaan ini kemudian menjadi legitimasi sosial yang memperkuat keberlanjutan dinasti politik (Siregar et al., 2021). Di sisi lain, lemahnya kelembagaan demokrasi di tingkat desa juga menjadi faktor yang mendukung berkembangnya politik dinasti. Kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya akses informasi menyebabkan masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan yang cukup dalam proses pemilihan kepala desa (Syatur, 2023).

Dalam konteks kepemimpinan, politik dinasti memiliki implikasi yang signifikan terhadap gaya dan pola kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan yang terbentuk dalam sistem dinasti cenderung bersifat personalistik, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh individu atau kelompok keluarga tertentu. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta melemahkan prinsip demokrasi. Selain itu, kepemimpinan kepala desa dalam sistem dinasti juga cenderung bersifat klientelistik, yaitu mengandalkan hubungan patron-klien antara pemimpin dan masyarakat. Dalam hubungan ini, kepala desa memberikan bantuan atau fasilitas sebagai imbalan atas dukungan politik. Pola

ini dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Susanti, 2023). Fenomena politik dinasti juga berdampak pada kualitas demokrasi lokal. Dalam banyak kasus, praktik ini menyebabkan terbatasnya ruang kompetisi politik, sehingga hanya kelompok tertentu yang memiliki peluang untuk menduduki jabatan kepala desa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan (Arifin, 2025).

Namun demikian, dalam beberapa kasus, politik dinasti juga dianggap mampu memberikan stabilitas pemerintahan dan kontinuitas pembangunan. Hal ini terjadi karena keluarga yang telah lama memimpin memiliki pengalaman dan jaringan yang luas dalam mengelola pemerintahan desa. Meskipun demikian, manfaat ini bersifat relatif dan tidak selalu menjamin terciptanya pemerintahan yang demokratis (Sartinayanti et al., 2024). Dengan demikian, politik dinasti dalam kepemimpinan desa merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami pola, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap demokrasi lokal, khususnya dalam konteks kepemimpinan kepala desa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena politik dinasti sebagai gejala sosial-politik yang kompleks dalam konteks kepemimpinan desa. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah dan menekankan pada pemaknaan terhadap fenomena, sehingga sesuai untuk menganalisis dinamika kekuasaan, hubungan sosial, serta praktik politik dinasti di tingkat desa.

Metode studi literatur digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan temuan empiris terkait politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Indonesia. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan politik dinasti dan kepemimpinan desa. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah nasional, buku akademik. Dengan literatur jurnal utama yang menjadi rujukan antara lain penelitian oleh Azmi Fiha' & Mas'udi (2023), Komar (2013), Prabowo & Hartati (2019), Susanti (2023), serta Noak (2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mencari literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan jurnal terindeks, Seleksi literatur berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi, Pengelompokan literatur berdasarkan tema pembahasan, seperti pola dinasti politik, faktor pembentuk, dan dampaknya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan isi dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data. Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Indonesia melalui pendekatan studi literatur yang sistematis, sehingga mampu mengungkap pola, faktor pembentuk, serta implikasinya terhadap dinamika demokrasi desa secara ilmiah. Data yang digunakan merupakan data sekunder, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan literatur yang dianalisis. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi lapangan.

## PEMBAHASAN

### Pola Dinasti Politik dalam Kepemimpinan Desa di Indonesia

#### 1. Pola Reproduksi Kekuasaan Keluarga

Fenomena dinasti politik dalam kepemimpinan desa di Indonesia menunjukkan adanya pola yang berulang dalam praktik kekuasaan lokal, dengan salah satu pola utama adalah reproduksi kekuasaan keluarga. Pola ini merujuk pada proses pewarisan jabatan kepala desa kepada anggota keluarga inti, seperti anak, pasangan, atau kerabat dekat, yang berlangsung secara berkelanjutan melalui mekanisme formal seperti pemilihan kepala desa. Berdasarkan studi literatur dari berbagai jurnal, pola ini menjadi karakteristik paling dominan dalam praktik dinasti politik di tingkat desa, didukung oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang saling berinteraksi. Penelitian oleh Prabowo dan Hartati (2019) di Desa Cileunyi Wetan mengungkapkan bahwa reproduksi kekuasaan keluarga terjadi secara sistematis melalui proses suksesi yang melibatkan anggota keluarga dekat sebagai kandidat kepala desa. Proses ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui persiapan yang matang, termasuk pembentukan citra politik, penguatan jaringan sosial, dan transfer pengetahuan serta pengalaman kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Dengan demikian, reproduksi kekuasaan keluarga dapat dipahami sebagai strategi politik yang dirancang untuk mempertahankan dominasi dalam struktur pemerintahan desa. Lebih lanjut, studi oleh Azmi Faiha' dan Mas'udi (2023) di Desa Sukowati, Bantul, menunjukkan bahwa keberhasilan pola ini sangat dipengaruhi oleh modal sosial keluarga. Keluarga kepala desa yang memiliki hubungan kuat dengan masyarakat cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan dalam pemilihan kepala desa.

Dalam konteks ini, reproduksi kekuasaan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, karena masyarakat memandang keluarga tersebut sebagai simbol stabilitas dan keberlanjutan kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi dalam dinasti politik tidak hanya berasal dari prosedur formal, tetapi juga dari pengakuan sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Penelitian oleh Susanti (2023) di Desa Nyogan, Kabupaten Muaro Jambi, mengungkap bahwa pola reproduksi kekuasaan keluarga juga didukung oleh legitimasi kinerja kepala desa sebelumnya. Masyarakat cenderung memilih anggota keluarga pemimpin sebelumnya karena menganggap bahwa mereka memiliki kapasitas yang sama atau lebih baik dalam melanjutkan program pembangunan desa.

Dalam hal ini, reproduksi kekuasaan keluarga tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap keberhasilan kepemimpinan sebelumnya. Dari perspektif yang lebih kritis, Komar (2013) menekankan bahwa pola reproduksi kekuasaan keluarga sering kali berkaitan dengan penguasaan sumber daya politik dan ekonomi desa. Kepala desa yang sedang menjabat memiliki akses terhadap anggaran desa, proyek pembangunan, dan jaringan birokrasi yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi keluarga dalam kontestasi politik. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kompetisi dalam pemilihan kepala desa, karena kandidat dari luar keluarga tidak memiliki sumber daya yang setara.

Dengan demikian, reproduksi kekuasaan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Selanjutnya, Noak (2024) menjelaskan bahwa dalam konteks desa di Indonesia, pola ini juga diperkuat oleh norma budaya dan struktur sosial lokal. Pewarisan kepemimpinan dalam keluarga dianggap sebagai hal yang wajar dan sah secara moral, terutama jika keluarga tersebut memiliki sejarah panjang dalam pelayanan masyarakat. Norma ini membuat masyarakat lebih menerima keberlanjutan kepemimpinan dalam satu keluarga dibandingkan dengan kandidat baru yang belum memiliki rekam jejak.

Namun, pola reproduksi kekuasaan keluarga juga menimbulkan implikasi terhadap kualitas demokrasi desa. Secara teoritis, praktik ini berpotensi menghambat sirkulasi elit politik dan membatasi kesempatan bagi individu lain untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan desa. Meskipun pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan secara formal, dominasi keluarga tertentu dapat menciptakan kompetisi yang tidak seimbang dan mengurangi kualitas demokrasi substantif di tingkat lokal. Di sisi lain, beberapa studi menunjukkan bahwa pola ini tidak selalu berdampak negatif.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

438

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Dalam kondisi tertentu, reproduksi kekuasaan keluarga justru dapat menciptakan stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan desa, terutama ketika keluarga kepala desa memiliki komitmen terhadap pelayanan publik dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pola ini memiliki sifat ambivalen, dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam sistem pemerintahan desa. Secara keseluruhan, berdasarkan studi literatur, pola reproduksi kekuasaan keluarga dalam dinasti politik desa di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Pola ini terbentuk melalui kombinasi antara modal sosial, legitimasi kinerja, penguasaan sumber daya, norma budaya, serta strategi politik keluarga. Oleh karena itu, analisis terhadap pola ini tidak dapat dilakukan secara sederhana, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial dan politik lokal yang melatarbelakanginya.

## 2. Pola Jaringan Sosial dan Elit Lokal (*Local Elite Network Pattern*)

Dalam kajian tentang dinasti politik di tingkat desa, pola jaringan sosial dan elit lokal menjadi salah satu aspek penting yang menjelaskan keberlanjutan kekuasaan kepala desa. Pola ini berbeda dari pola reproduksi kekuasaan keluarga yang lebih berfokus pada hubungan kekerabatan. Sebaliknya, pola jaringan sosial menekankan pada kemampuan aktor politik untuk membangun aliansi strategis dengan berbagai elit lokal, seperti tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, serta aktor informal lainnya. Berdasarkan studi literatur, kekuasaan dalam dinasti politik desa tidak hanya diwariskan melalui garis keluarga, tetapi juga dipertahankan melalui jaringan sosial yang luas dan terorganisir. Penelitian Komar (2013) menunjukkan bahwa keberhasilan dinasti politik di desa sangat bergantung pada konsolidasi jaringan elit lokal. Kepala desa dinastik tidak hanya mengandalkan hubungan keluarga, tetapi juga membangun relasi dengan aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Elit lokal berfungsi sebagai perantara antara pemerintah desa dan masyarakat, serta sebagai agen legitimasi yang memperkuat posisi politik kepala desa. Dengan demikian, kekuasaan dinasti bukan hanya hasil dari hubungan individual atau keluarga, tetapi juga merupakan hasil dari koalisi kekuatan sosial di tingkat lokal.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Prabowo dan Hartati (2019) di Desa Cileunyi Wetan, yang menunjukkan bahwa kemenangan kandidat dari keluarga dinastik tidak terlepas dari dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dukungan ini berperan penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi pemilih, di mana jaringan elit lokal berfungsi sebagai "broker politik" yang menjembatani hubungan antara kandidat dan masyarakat. Pola ini menegaskan bahwa keberhasilan dinasti politik lebih ditentukan oleh jaringan sosial ketimbang sekadar hubungan darah. Azmi Faiha' dan Mas'udi (2023) menambahkan bahwa pola jaringan sosial ini dibangun melalui interaksi sosial yang intensif dan berkelanjutan.

Kepala desa dinastik biasanya aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan adat untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat dan elit lokal. Aktivitas ini menciptakan kedekatan emosional yang berkembang menjadi dukungan politik, di mana jaringan sosial tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga kultural dan simbolik. Dalam studi Susanti (2023) di Desa Nyogan, ditemukan bahwa jaringan elit lokal sering terintegrasi dalam struktur kekuasaan informal desa. Tokoh masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan dinasti.

Hubungan antara kepala desa dan elit lokal bersifat timbal balik, di mana kepala desa memberikan akses terhadap sumber daya, sementara elit lokal memberikan dukungan politik. Pola ini menunjukkan adanya hubungan patronase dalam jaringan sosial. Dibandingkan dengan pola reproduksi kekuasaan keluarga, pola jaringan sosial dan elit lokal memiliki karakteristik yang berbeda. Pola reproduksi keluarga lebih menekankan pada pewarisan kekuasaan melalui hubungan darah, sedangkan pola jaringan sosial menekankan pada relasi eksternal yang melibatkan berbagai aktor di luar keluarga. Meskipun demikian, kedua pola ini sering saling melengkapi, di mana keberhasilan reproduksi kekuasaan keluarga bergantung pada kekuatan jaringan sosial yang dimiliki. Noak (2024) menjelaskan bahwa dinasti politik akan sulit bertahan tanpa dukungan jaringan elit lokal yang kuat, karena legitimasi sosial dibangun tidak hanya dari hubungan keluarga, tetapi juga dari pengakuan kolektif masyarakat. Secara kritis, pola jaringan sosial dan elit lokal memiliki implikasi terhadap demokrasi desa. Di satu sisi, jaringan ini dapat

memperkuat stabilitas politik dan mempermudah koordinasi pembangunan desa. Namun, di sisi lain, jaringan yang terlalu kuat dapat menciptakan oligarki lokal, di mana kekuasaan hanya berputar di antara kelompok elit tertentu dan membatasi akses bagi aktor politik baru, yang berpotensi mengurangi kualitas demokrasi substantif di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik desa di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan formal seperti pemilihan kepala desa, tetapi juga melalui pendekatan sosiologis yang mempertimbangkan peran hubungan sosial dan struktur kekuasaan informal. Dengan demikian, pola jaringan sosial dan elit lokal merupakan elemen kunci dalam memahami dinasti politik desa di Indonesia. Pola ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya diwariskan melalui keluarga, tetapi juga dibangun melalui jaringan relasi sosial yang kompleks. Analisis terhadap pola ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana dinasti politik dapat bertahan dan berkembang dalam sistem demokrasi desa.

### **3. Pola Legitimasi Kinerja (*Performance-Based Legitimacy Pattern*)**

Dalam kajian mengenai dinasti politik di tingkat desa, pola legitimasi kinerja diidentifikasi sebagai bentuk legitimasi kekuasaan yang berasal dari keberhasilan kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pola ini berbeda dari pola reproduksi kekuasaan keluarga yang bergantung pada hubungan kekerabatan, serta pola jaringan sosial dan elit lokal yang menekankan relasi kekuasaan. Legitimasi kinerja berakar pada penilaian rasional masyarakat terhadap capaian konkret dari kepemimpinan, sehingga keberlangsungan dinasti politik tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural, tetapi juga oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja pemimpin sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Susanti (2023) di Desa Nyogan, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan bahwa masyarakat memilih kandidat dari keluarga kepala desa sebelumnya karena mereka menilai kepemimpinan tersebut berhasil dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, pelayanan administrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, legitimasi dinasti tidak berasal dari hubungan darah, tetapi dari kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemimpin sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dinasti politik dapat memperoleh dukungan demokratis jika mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Penelitian oleh Prabowo dan Hartati (2019) di Desa Cileunyi Wetan juga menemukan bahwa keberlanjutan kepemimpinan dalam satu keluarga didukung oleh persepsi masyarakat tentang kompetensi dan pengalaman kepala desa sebelumnya. Masyarakat cenderung memilih kandidat dari keluarga yang sama dengan harapan adanya kontinuitas kebijakan dan stabilitas pembangunan desa. Dalam konteks ini, legitimasi kinerja berfungsi sebagai mekanisme rasionalisasi pilihan politik masyarakat. Azmi Faiha' dan Mas'udi (2023) menekankan bahwa pola legitimasi kinerja sering diperkuat oleh transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepala desa yang mampu mengelola anggaran secara terbuka, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan memberikan pelayanan responsif akan memperoleh tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal politik bagi anggota keluarga yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa berikutnya.

Oleh karena itu, kinerja yang baik tidak hanya berdampak pada pembangunan desa, tetapi juga pada reproduksi kekuasaan dalam bentuk dinasti. Dari perspektif teoritis, Noak (2024) menjelaskan bahwa legitimasi kinerja adalah bagian dari legitimasi rasional-legal, di mana dukungan masyarakat terhadap pemimpin didasarkan pada kapasitas dan hasil kerja, bukan hanya faktor tradisional atau personal. Dinasti politik dapat tetap eksis dalam sistem demokrasi selama mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, menunjukkan bahwa dinasti politik tidak selalu bertentangan dengan prinsip demokrasi, asalkan didukung oleh legitimasi berbasis kinerja. Namun, pola legitimasi kinerja memiliki perbedaan mendasar dengan pola lainnya.

Berbeda dengan pola reproduksi kekuasaan keluarga yang bersifat ascribed (ditentukan oleh hubungan darah), legitimasi kinerja bersifat achieved (ditentukan oleh prestasi). Sementara pola jaringan elit lokal bergantung pada relasi sosial, legitimasi kinerja bergantung pada evaluasi masyarakat terhadap hasil nyata pemerintahan. Meskipun pola legitimasi kinerja terlihat lebih ideal, terdapat potensi bias dalam

persepsi masyarakat. Komar (2013) mencatat bahwa keberhasilan kinerja kepala desa sering kali diasosiasikan dengan keluarga pemimpin, sehingga masyarakat dapat menggeneralisasi bahwa anggota keluarga lainnya juga memiliki kemampuan yang sama, berpotensi menyebabkan over-generalisasi kompetensi.

Legitimasi kinerja juga dipengaruhi oleh kontrol informasi dan komunikasi politik. Kepala desa yang mampu membangun citra positif melalui komunikasi publik yang efektif dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja, meskipun capaian yang sebenarnya mungkin tidak sepenuhnya objektif. Dalam konteks ini, legitimasi kinerja dapat beririsan dengan strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga. Namun, pola legitimasi kinerja juga memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola desa, karena kepala desa dinastik terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efektivitas pembangunan. Secara keseluruhan, pola legitimasi kinerja dalam dinasti politik desa di Indonesia menunjukkan bahwa keberlangsungan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam menghasilkan kinerja yang diakui masyarakat

## Faktor Terbentuknya Dinasti Politik dalam Kepemimpinan Desa

### 1. Modal Sosial Keluarga

Dalam kajian politik lokal di Indonesia, khususnya pada tingkat desa, modal sosial keluarga diidentifikasi sebagai faktor utama yang mendorong terbentuknya dan bertahannya dinasti politik. Modal sosial keluarga merujuk pada jaringan hubungan sosial, kepercayaan, norma, dan nilai yang dimiliki oleh suatu keluarga dalam masyarakat. Modal ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dan dalam konteks kepemimpinan desa, modal sosial tidak hanya bersifat individual, melainkan juga melekat pada keluarga sebagai satu kesatuan sosial dengan sejarah, reputasi, dan pengaruh di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi Faiha' dan Mas'udi (2023) di Desa Sukowati, Bantul, menunjukkan bahwa keluarga kepala desa memiliki jaringan sosial yang luas dan kuat, mencakup hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok sosial lainnya.

Jaringan ini memungkinkan keluarga tersebut untuk memobilisasi dukungan politik secara efektif dalam pemilihan kepala desa. Modal sosial yang tinggi membuat keluarga tersebut lebih dikenal, dipercaya, dan diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan peluang anggota keluarga untuk terpilih sebagai kepala desa. Lebih lanjut, penelitian Susanti (2023) di Desa Nyogan, Kabupaten Muaro Jambi, mengungkapkan bahwa modal sosial keluarga juga terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan antara kepala desa dan masyarakat. Kepala desa yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan mampu membangun kedekatan emosional dengan warga, yang kemudian diwariskan kepada anggota keluarga, menciptakan transfer kepercayaan sosial dari generasi ke generasi.

Modal sosial dalam hal ini bersifat dinamis dan terus berkembang melalui praktik sosial sehari-hari. Komar (2013) menambahkan bahwa modal sosial keluarga dalam dinasti politik desa berkaitan dengan kapital simbolik, seperti nama baik keluarga, sejarah kepemimpinan, dan kontribusi terhadap pembangunan desa. Kapital simbolik ini menjadi sumber legitimasi yang kuat, karena masyarakat cenderung memilih kandidat dari keluarga yang telah terbukti berperan dalam kemajuan desa. Dengan demikian, modal sosial keluarga tidak hanya berbentuk jaringan relasi, tetapi juga mencakup reputasi dan citra yang dibangun secara historis.

Dalam perspektif yang lebih luas, Noak (2024) menegaskan bahwa modal sosial keluarga merupakan bagian dari struktur sosial yang memengaruhi perilaku politik masyarakat desa. Dalam masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat, kepercayaan terhadap individu sering kali didasarkan pada hubungan personal dan kedekatan sosial, bukan semata pada program atau visi politik. Oleh karena itu, kandidat dari keluarga yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih diuntungkan dalam kontestasi politik desa. Prabowo dan Hartati (2019) juga menemukan bahwa di Desa Cileunyi Wetan, modal sosial keluarga berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan dinasti politik.

Keluarga kepala desa mampu mempertahankan kekuasaan berkat jaringan yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk elit lokal. Jaringan ini tidak hanya digunakan untuk memperoleh dukungan politik, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik dalam masyarakat. Modal sosial keluarga memiliki perbedaan mendasar dengan faktor lain seperti sumber daya ekonomi atau kekuasaan formal. Sumber daya ekonomi bersifat material, sedangkan modal sosial bersifat relasional dan kultural, yang lebih sulit diukur tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan keberhasilan politik.

Modal sosial juga lebih berkelanjutan, karena dapat diwariskan melalui nilai, norma, dan hubungan sosial yang telah terbangun. Namun, keberadaan modal sosial keluarga dalam dinasti politik juga memiliki implikasi terhadap demokrasi desa. Dominasi keluarga dengan modal sosial tinggi dapat menciptakan ketimpangan akses politik, di mana kandidat dari luar keluarga atau kelompok tertentu sulit bersaing karena tidak memiliki jaringan dan kepercayaan yang setara. Hal ini berpotensi menghambat sirkulasi elit dan mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat.

Di sisi lain, modal sosial keluarga dapat memberikan dampak positif, terutama dalam menciptakan stabilitas kepemimpinan dan efektivitas pemerintahan desa. Kepala desa dengan jaringan sosial yang kuat cenderung lebih mudah mengoordinasikan program pembangunan, membangun partisipasi masyarakat, dan menyelesaikan konflik sosial. Dengan demikian, modal sosial dapat menjadi aset penting dalam tata kelola desa jika digunakan secara inklusif dan transparan. Secara keseluruhan, berdasarkan studi literatur, modal sosial keluarga merupakan faktor kunci dalam terbentuknya dinasti politik dalam kepemimpinan desa di Indonesia. Modal ini mencakup jaringan sosial, kepercayaan masyarakat, reputasi keluarga, serta nilai-nilai budaya yang mendukung keberlanjutan kekuasaan. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan reproduksi kekuasaan dalam keluarga, sekaligus menunjukkan bahwa dinamika politik desa tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang melingkupinya.

## 2. Sumber Daya Ekonomi

Dalam dinamika politik lokal di Indonesia, terutama di tingkat desa, sumber daya ekonomi memainkan peran strategis dalam pembentukan dan keberlangsungan dinasti politik. Sumber daya ekonomi ini meliputi penguasaan anggaran desa, akses terhadap proyek pembangunan, distribusi bantuan pemerintah, serta kontrol terhadap aset ekonomi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi ini menjadi alat utama bagi kepala desa dan keluarganya untuk membangun pengaruh politik dan mempertahankan kekuasaan dalam lingkup dinasti. Komar (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepala desa yang sedang menjabat memiliki posisi kunci dalam pengelolaan sumber daya ekonomi desa, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan patronase.

Dengan mendistribusikan proyek pembangunan dan bantuan sosial, kepala desa menciptakan hubungan timbal balik dengan masyarakat yang memperkuat loyalitas politik warga, mendukung keberlanjutan kekuasaan dalam keluarga kepala desa. Oleh karena itu, sumber daya ekonomi berfungsi ganda sebagai alat pembangunan dan alat konsolidasi kekuasaan. Penelitian Prabowo dan Hartati (2019) di Desa Cileunyi Wetan menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi memberikan keunggulan kompetitif bagi keluarga kepala desa dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades). Kandidat dari keluarga dinastik sering memiliki kemampuan finansial yang lebih untuk kampanye dan membangun relasi politik, menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penentu penting dalam kemenangan kandidat. Azmi Faiha' dan Mas'udi juga mencatat bahwa sumber daya ekonomi sering digunakan untuk memperkuat kapital sosial dan politik keluarga. Kepala desa yang efektif dalam mengelola anggaran dan mendistribusikan manfaat pembangunan memperoleh kepercayaan publik, yang kemudian menjadi modal politik bagi anggota keluarga yang mencalonkan diri di Pilkades berikutnya. Dengan demikian, sumber daya ekonomi menjadi penghubung antara kekuasaan formal dan legitimasi sosial.

Studi Susanti (2023) di Desa Nyogan, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya ekonomi desa berkaitan dengan pengendalian akses terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa yang dapat menentukan penerima bantuan sosial atau proyek pembangunan memengaruhi preferensi politik masyarakat, menciptakan ketergantungan yang memperkuat posisi dinasti politik dalam jangka panjang. Dalam pandangan yang lebih luas, Noak (2024) menjelaskan bahwa sumber daya ekonomi merupakan bagian dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang dalam politik lokal. Kandidat yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi cenderung lebih mungkin memenangkan pemilihan, dengan kemampuan mengonversi kekuatan ekonomi menjadi dukungan politik.

Ini menunjukkan bahwa dinasti politik terbentuk tidak hanya melalui hubungan keluarga tetapi juga melalui kapasitas ekonomi. Secara analitis, sumber daya ekonomi berbeda dari modal sosial keluarga. Sementara modal sosial bersifat relasional dan berbasis kepercayaan, sumber daya ekonomi bersifat material dan instrumental, digunakan langsung untuk memengaruhi perilaku politik masyarakat. Keduanya saling melengkapi, di mana kekuatan ekonomi memperkuat jaringan sosial dan sebaliknya.

Namun, dominasi sumber daya ekonomi dalam dinasti politik desa dapat menimbulkan distorsi demokrasi lokal. Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat menghambat persaingan politik yang sehat dan mempersempit peluang bagi kandidat luar keluarga dinastik. Penggunaan sumber daya ekonomi untuk kepentingan politik juga berpotensi menimbulkan praktik klientelisme dan penyalahgunaan anggaran desa. Di sisi positif, jika dikelola dengan transparan dan akuntabel, sumber daya ekonomi dapat berdampak positif pada tata kelola desa.

Kepala desa yang memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan legitimasi kepemimpinan. Keberhasilan pengelolaan ekonomi desa dapat menjadi dasar legitimasi bagi keberlanjutan dinasti politik, terutama jika masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Secara keseluruhan, studi literatur menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi adalah faktor penting dalam terbentuknya dinasti politik dalam kepemimpinan desa di Indonesia. Penguasaan terhadap sumber daya ekonomi memungkinkan kepala desa dan keluarganya membangun pengaruh politik, memperkuat jaringan sosial, dan menciptakan loyalitas masyarakat. Namun, peran ini harus diimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari ketimpangan dan merusak kualitas demokrasi desa.

### 3. Dukungan Elit Lokal

Dalam konteks politik lokal di Indonesia, terutama pada tingkat desa, dukungan elit lokal menjadi salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada pembentukan dan keberlangsungan dinasti politik. Elit lokal yang dimaksud mencakup berbagai tokoh, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, serta aktor informal lainnya yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini dan perilaku politik masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan elit lokal tidak hanya bersifat pasif, melainkan mereka berperan aktif dalam menentukan arah kekuasaan di desa. Penelitian oleh Komar (2013) mengungkapkan bahwa keberlangsungan dinasti politik di desa sangat dipengaruhi oleh koalisi antara kepala desa dan elit lokal.

Dalam hal ini, elit lokal berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah desa dengan masyarakat. Dukungan dari elit lokal dapat meningkatkan legitimasi kepala desa, karena masyarakat cenderung mengikuti rekomendasi dari tokoh yang mereka percayai. Dengan demikian, elit lokal menjadi sumber legitimasi sosial yang memperkuat posisi dinasti politik. Azmi Faiha' dan Mas'udi (2023) menegaskan bahwa hubungan antara kepala desa dan elit lokal bersifat timbal balik.

Kepala desa menyediakan akses terhadap sumber daya, seperti proyek pembangunan atau posisi strategis, sementara elit lokal memberikan dukungan politik dan legitimasi sosial. Hubungan ini menunjukkan keterkaitan erat antara dukungan elit lokal dan praktik patronase dalam dinasti politik. Studi Susanti (2023) di Desa Nyogan, Kabupaten Muaro Jambi, juga menemukan bahwa elit lokal berperan sebagai aktor yang berkepentingan dalam mempertahankan dinasti politik, dengan cenderung mendukung kandidat dari keluarga kepala desa karena adanya kesinambungan hubungan dan kepentingan. Noak (2024) menjelaskan bahwa di masyarakat desa dengan struktur sosial yang kuat, elit lokal sangat berperan dalam membentuk norma dan persepsi politik.

Masyarakat desa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh lokal, sehingga pilihan politik mereka sering dipengaruhi oleh sikap dan preferensi elit tersebut. Ini menunjukkan bahwa dukungan elit lokal dapat menjadi faktor dominan dalam menentukan hasil kontestasi politik di desa. Secara analitis, dukungan elit lokal berbeda dengan faktor lain seperti modal sosial keluarga atau sumber daya ekonomi. Dukungan elit lokal bersifat relasional eksternal, melibatkan aktor di luar keluarga yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dinasti tidak hanya dibangun dari dalam, tetapi juga dari luar melalui aliansi strategis. Namun, dominasi elit lokal dalam mendukung dinasti politik dapat menciptakan oligarki lokal, di mana kekuasaan berputar di antara kelompok tertentu, menghambat sirkulasi elit dan membatasi partisipasi politik masyarakat yang lebih luas. Di sisi positif, dukungan elit lokal dapat meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan desa. Elit lokal yang berkomitmen terhadap kepentingan masyarakat dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan warga, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Dukungan elit lokal menjadi aset penting dalam tata kelola desa yang baik. Secara keseluruhan, dukungan elit lokal merupakan faktor penting dalam terbentuknya dinasti politik dalam kepemimpinan desa di Indonesia, menjadikan mereka penentu penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan dinasti politik. Analisis terhadap dinasti politik desa perlu mempertimbangkan peran elit lokal sebagai bagian integral dari struktur kekuasaan di tingkat lokal, yang menciptakan reproduksi kekuasaan yang stabil namun kompleks secara sosial-politik.

## Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Sistem Dinasti Politik di Indonesia

Fenomena politik dinasti di desa Indonesia muncul sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan yang diwariskan dalam satu keluarga atau jaringan sosial tertentu. Dinasti politik desa tidak hanya menunjukkan keberlanjutan jabatan kepala desa dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga mencerminkan struktur sosial, ekonomi, dan simbolik di tingkat lokal. Dalam konteks ini, kepala desa sering kali dipilih tidak hanya berdasarkan kompetensi formal atau program kerja, tetapi juga karena legitimasi sosial yang dibangun melalui hubungan keluarga, jaringan tokoh masyarakat, dan pengalaman kepemimpinan sebelumnya (Azmi Faiha' & Mas'udi, 2023).

Kepemimpinan kepala desa dalam sistem dinasti politik biasanya menekankan kepemimpinan relasional. Artinya, kepala desa memanfaatkan jaringan sosial dan modal simbolik keluarga untuk memelihara dukungan warga, membangun kredibilitas, dan memastikan keberlanjutan kepemimpinan. Gaya ini berbeda dari kepemimpinan berbasis birokrasi semata, karena lebih mengedepankan konsultasi, kolaborasi, dan komunikasi interpersonal dengan warga desa (Susanti, 2023).

Dalam banyak kasus, dinasti politik desa tetap memperhatikan mekanisme demokrasi lokal seperti Pilkades atau musyawarah desa. Kepala desa dinastik yang berhasil biasanya mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif, yang memungkinkan warga merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Misalnya, kepala desa rutin mengadakan forum musyawarah untuk mendengarkan aspirasi warga, sehingga meskipun kepemimpinan bersifat dinastik, mekanisme partisipatif tetap berjalan (Prabowo & Hartati, 2019).

Gaya kepemimpinan kepala desa dinastik juga sering bersifat konsultatif dan kolaboratif, di mana tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, dan kelompok perempuan dilibatkan dalam diskusi kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi politik kepala desa, tetapi juga memastikan kebijakan desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Komar, 2013).

Selain itu, beberapa kepala desa menggunakan kepemimpinan transformasional untuk menginspirasi dan memotivasi warga. Gaya ini menekankan pembangunan kapasitas warga, mendorong partisipasi aktif dalam program desa, dan menciptakan visi jangka panjang yang berkelanjutan. Kepemimpinan transformasional ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dinasti politik dalam menjaga dukungan warga dan mengimplementasikan program pembangunan (Prabowo & Hartati, 2019). Kepemimpinan kepala desa dalam konteks dinasti juga harus mempertimbangkan stabilitas sosial dan politik desa. Kepala desa yang

mampu menjaga hubungan harmonis dengan warga, menyelesaikan konflik internal, dan mengelola sumber daya lokal secara adil akan memperoleh legitimasi lebih besar, sehingga dinasti politik dapat bertahan dan beradaptasi dengan mekanisme demokrasi desa (Susanti, 2023).

Namun, praktik dinasti politik tidak lepas dari tantangan etis. Jika kepala desa terlalu dominan atau kurang transparan, risiko kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat meningkat. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang efektif dalam dinasti politik harus menyeimbangkan antara legitimasi keluarga dengan prinsip demokrasi dan partisipasi warga (Noak, 2024).

Secara keseluruhan, kepemimpinan kepala desa dalam konteks dinasti politik merupakan kombinasi antara pemanfaatan modal sosial, keterampilan relasional, kemampuan kolaboratif, dan strategi demokratis yang menjaga legitimasi. Praktik kepemimpinan ini menunjukkan bahwa meskipun dinasti politik memiliki risiko, gaya kepemimpinan yang adaptif dapat mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan desa, sekaligus mendukung partisipasi demokrasi lokal.

## Dampak Positif dan Negatif Kepemimpinan Politik Dinasti terhadap Demokrasi Desa

### 1. Dampak Positif Kepemimpinan Desa Terhadap Politik Dinasti

Salah satu dampak positif dari politik dinasti di tingkat desa adalah konsistensi kepemimpinan yang mendukung stabilitas demokrasi lokal. Di Desa Randugede, misalnya, praktik politik dinasti mendapat dukungan masyarakat yang percaya bahwa kepemimpinan berkelanjutan dapat menciptakan stabilitas pemerintahan dan memperkuat kepercayaan warga terhadap proses demokrasi lokal, meskipun wacana konstitusional tetap perlu diperkuat. Dalam konteks ini, warga desa tetap terlibat dalam demokrasi desa, seperti dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Pilkades, karena figur pemimpin yang dikenal luas memiliki keakraban dengan masyarakat. Hal ini mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, yang merupakan esensi dari demokrasi desa yang partisipatif.

Studi kasus di Desa Sukowati, Bantul menunjukkan bahwa dinasti politik bukan hanya tentang hubungan kekerabatan, tetapi juga legitimasi yang dibangun melalui kualitas pribadi pemimpin dan mobilisasi sumber daya sosial ekonomi yang efektif. Ketika warga mengakui kualitas pemimpin yang terus memimpin desa, legitimasi sosial ini memperkuat kepercayaan warga terhadap proses demokrasi, karena pilihan yang diambil berdasarkan pengalaman dan penghargaan terhadap kemampuan pemimpin, bukan semata hubungan darah. Selain itu, politik dinasti di desa memungkinkan transfer pengalaman administratif dan politik antar generasi pemimpin, di mana penerus yang berasal dari jaringan yang sama biasanya sudah memahami seluk beluk pemerintahan desa. Dinasti politik lokal sering didukung oleh jaringan sosial yang kuat.

Contohnya, jaringan pendukung dinasti Wasis Sambodo di Desa Sukowati tidak hanya mempertahankan kekuasaan tetapi juga memperkuat keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pembangunan sosial politik desa. Jaringan ini dapat memfasilitasi demokrasi partisipatif, di mana warga merasa memiliki peran aktif dalam dialog, musyawarah, dan pengawasan pemerintahan lokal. Konsistensi kepemimpinan yang muncul dari politik dinasti juga meningkatkan efisiensi proses demokrasi desa, karena musyawarah, konsultasi, dan prosedur pemilihan berlangsung dengan pemahaman yang lebih matang, sehingga meminimalkan konflik internal yang dapat mengganggu proses demokrasi. Dalam kondisi tertentu, praktik politik dinasti menciptakan kesinambungan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi desa.

Karena pemimpin dan calon penerusnya dikenal oleh masyarakat, warga desa lebih cenderung menyuarakan aspirasi mereka dalam forum desa daripada menarik diri dari aktivitas politik lokal. Ini menunjukkan bahwa dinasti politik, jika didukung oleh legitimasi sosial tinggi, dapat memperkuat partisipasi warga dalam demokrasi desa. Studi persepsi masyarakat di Desa Kepuh menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memandang positif praktik politik dinasti ketika mereka memahami rekam jejak pemimpin sebelumnya, sehingga dinasti dianggap sah dan wajar dalam konteks demokrasi lokal. Kepemimpinan yang berlangsung dalam satu jaringan yang dikenal oleh warga juga memastikan

kontinuitas program pembangunan demokratis, seperti penyusunan RKPDes yang melibatkan partisipasi publik.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan jangka panjang yang disepakati secara demokratis tetap berjalan meskipun terjadi pergantian periode pemerintahan desa. Akhirnya, politik dinasti di desa dapat membantu masyarakat memahami demokrasi desa secara lebih matang, terutama ketika proses demokratis seperti Pilkades berlangsung terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Interaksi dengan figur pemimpin yang dikenal dan dipercaya menciptakan pemahaman lebih mendalam tentang hak dan kewajiban warga dalam demokrasi desa, melampaui sekadar pilihan kandidat dari keluarga yang sama.

## **2. Dampak Negatif Kepemimpinan Desa dalam Sistem Politik Dinasti**

Kepemimpinan desa dalam sistem politik dinasti di Indonesia menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan yang kuat dalam lingkup keluarga tertentu. Di Provinsi Banten dan Jawa Timur, terdapat banyak kasus di mana jabatan kepala desa diwariskan kepada anggota keluarga, baik melalui hubungan suami-istri maupun garis keturunan langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuasaan desa telah menjadi eksklusif, terpusat pada kelompok elite, dan tidak lagi bersifat terbuka bagi masyarakat umum. Konsentrasi kekuasaan ini berkontribusi pada terbentuknya oligarki lokal, yang berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik.

Masyarakat yang berada di luar lingkaran keluarga penguasa sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya politik, yang secara kritis menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip demokrasi yang mengedepankan kesetaraan politik. Akibatnya, kekuasaan yang seharusnya didistribusikan secara merata menjadi eksklusif, memperkuat struktur kekuasaan yang tidak demokratis dan menghambat perkembangan sistem pemerintahan desa yang inklusif dan partisipatif. Dalam banyak kasus di Indonesia, pemilihan kepala desa di bawah sistem dinasti mengalami distorsi demokrasi. Kandidat dari keluarga petahana memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, jaringan sosial, dan legitimasi politik, menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi.

Di beberapa desa di Indonesia yang melakukan politik dinasti dalam kepemimpinan kepala desa mengakibatkan kandidat dari luar dinasti kesulitan mendapatkan dukungan karena dominasi pengaruh keluarga penguasa, sehingga pemilihan kepala desa tidak berlangsung secara kompetitif. Hal ini menunjukkan adanya "elite capture" dalam demokrasi desa, di mana institusi demokrasi dikuasai oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Distorsi ini juga mempengaruhi kualitas representasi politik, di mana pemimpin yang terpilih tidak selalu mencerminkan kehendak masyarakat luas, tetapi lebih merupakan hasil dari dominasi struktur kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi desa menjadi prosedural tanpa substansi, tidak mampu menghasilkan kepemimpinan yang representatif dan akuntabel.

Selain itu, kepemimpinan desa dalam sistem dinasti sering kali diwarnai oleh praktik nepotisme, di mana perangkat desa diisi oleh anggota keluarga kepala desa, mengabaikan prinsip meritokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Praktik patronase politik juga berkembang dalam konteks ini, di mana bantuan sosial dan proyek pembangunan didistribusikan kepada kelompok pendukung, menciptakan hubungan kekuasaan yang bersifat transaksional. Hal ini menguatkan ketergantungan masyarakat terhadap kepala desa dan menghambat kemandirian serta partisipasi politik yang rasional. Dalam jangka panjang, kombinasi nepotisme dan patronase dapat merusak tata kelola pemerintahan desa dan memperkuat dominasi dinasti politik. Mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam sistem dinasti cenderung melemah akibat dominasi kekuasaan oleh keluarga tertentu. Kasus penyalahgunaan dana desa di beberapa wilayah menunjukkan lemahnya pengawasan sebagai faktor utama. Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas, sering kali tidak berfungsi optimal karena berada di bawah pengaruh kepala desa atau memiliki hubungan kekerabatan. Akibatnya, pengelolaan anggaran desa menjadi tidak transparan dan rentan terhadap praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang, menunjukkan kegagalan sistem checks and balances yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi lokal.

Kepemimpinan dinasti juga berdampak pada ketimpangan sosial dalam pembangunan desa. Distribusi pembangunan lebih difokuskan pada kelompok pendukung kepala desa, menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Masyarakat yang merasa tidak diuntungkan cenderung bersikap apatis terhadap proses politik, yang menyebabkan menurunnya partisipasi politik. Partisipasi yang terjadi sering kali bersifat pragmatis akibat praktik klientelisme, sehingga mengurangi kualitas demokrasi yang partisipatif.

Dominasi keluarga dalam sistem politik dinasti membatasi ruang bagi individu lain untuk menjadi pemimpin desa. Jabatan kepala desa sering diwariskan secara turun-temurun, menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengurangi kemampuan desa untuk berkembang secara adaptif dan berkelanjutan. Stagnasi ini disebabkan oleh tidak adanya kompetisi yang sehat yang dapat mendorong munculnya ide-ide baru, sehingga kepemimpinan desa cenderung stagnan dan kurang inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

## KESIMPULAN

Politik dinasti tidak hanya muncul karena hubungan kekerabatan, tetapi juga dipengaruhi oleh modal sosial keluarga, penguasaan sumber daya ekonomi, serta dukungan elit lokal yang secara bersama-sama memperkuat posisi keluarga tertentu dalam struktur kekuasaan desa. Faktor-faktor tersebut memungkinkan terjadinya reproduksi kekuasaan secara berkelanjutan dalam lingkup keluarga kepala desa. Selain itu, pola dinasti politik dalam kepemimpinan desa menunjukkan adanya mekanisme seperti reproduksi kekuasaan keluarga, jaringan sosial dan elit lokal, serta legitimasi kinerja yang menjadi dasar keberlangsungan kekuasaan. Dalam konteks ini, keberhasilan kepala desa sebelumnya dalam menjalankan pemerintahan sering kali menjadi sumber legitimasi bagi anggota keluarga yang melanjutkan kepemimpinan, sehingga menciptakan kontinuitas kekuasaan yang relatif stabil. Dari perspektif demokrasi desa, politik dinasti memiliki implikasi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, dinasti politik dapat memberikan dampak positif berupa stabilitas kepemimpinan, kesinambungan kebijakan, serta efektivitas pembangunan desa. Namun di sisi lain, praktik ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan akses politik, melemahnya sirkulasi elit, serta dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu, yang dapat mengurangi kualitas demokrasi lokal. Dengan demikian, politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dinilai secara sepihak. Diperlukan keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan dan prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat agar praktik politik dinasti tidak mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

## REFERENSI

- Arifin, F. (2025). Politik dinasti dan pembaruan sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 31(3), 636–665.
- Azmi Faiha', L., & Mas'udi, W. (2023). *Praktik politik dinasti dalam pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Sukowati, Bantul, D.I.Yogyakarta)*. Universitas Gadjah Mada
- Dwinugraha, A. P. (2020). Kepemimpinan politik kepala desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 117–125.
- Faiha', L. A., & Mas'udi, W. (2023). *Praktik Politik Dinasti dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sukowati, Bantul, D.I.Yogyakarta)*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Fitrianingsih & Saragih, H. A. (tahun). *Political dynasties and the moderating role of good public governance*(mengimplikasikan pentingnya tata kelola baik dalam meminimalkan efek negatif).
- Gadafi, K., & Nelwati, S. (2024). *Dampak dinasti politik terhadap culture demokrasi Pancasila di Indonesia* (termasuk aspek positif). *Journal Innovation in Education*, 2(3), 133–148.
- Hastira, M. F., et al. (2024). Dinasti Politik dan Budaya Lokal. *Jurnal Politeia USU*.
- Hermansyah, F. (2017). *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(02).

- Komar, S. (2013). *Dinasti Kepala Desa: Studi tentang survivabilitas dinasti politik di Desa Puput*. Universitas Gadjah Mada.
- Lestario, W. (2022). *Politik dinasti dalam kepemimpinan desa*. *Jurnal Sociopolitico*, 4(1), 49–57.
- Noak, P. A. (2024). *Analysis of the Existence of Political Dynasties in Village Head Elections in Indonesia*. *International Journal of Religion*, 5(10), 1135–1145.
- Piers Andreas Noak (2024). *Analysis of the existence of political dynasties in village head elections in Indonesia*. *International Journal of Religion*, 5(10), 1135–1145.
- Prabowo, H., & Hartati, S. (2019). *Dynasty Politics in Succession of Village Leadership: A Case Study in the Village of Cileunyi Wetan, Indonesia*. *International Journal of Science and Society*, 1(3), 80–86.
- Siregar, M. T., et al. (2021). *Politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Indonesia*. *Jurnal Perspektif*.
- Susanti, F. (2023). *Analisis pola terbentuknya dinasti politik Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi*. *JISIP UNJA*.
- Syanur, A. D. M., Shantih, I. B., & Afrilia, L. (2023). *Politik dinasti di Indonesia: Tinjauan kritis terhadap penerapan demokrasi*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(3), 17–26
- Tristana, R. W. (tahun). *Dinasti politik dalam pemerintahan desa (mengulas dampak positif dalam konteks tertentu)*.
- Vira, A. (n.d.). *Politik Dinasti Pemilihan Kepala Desa Randugede Kec. Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur Perspektif Demokrasi Konstitusional*. *Jurnal Hukum Indonesia*.